

SURYA Keadilan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN : 2599-2252; E-ISSN : 2622-5166

Vol.2, No. 2, November 2018



Evaluasi Penegakan Hukum Perlindungan terhadap Anak Anak Korban Perceraian di Kota Bengkulu

Betra Sarianti¹

Hendri Padmi²

Email: betra.sarianti@gmail.com, hendri.padmi@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

Fakta yang terjadi ditengah masyarakat banyak anak anak korban perceraian tidak dinafkahi oleh orang tua dalam hal ini ayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penegakan hukum perlindungan anak dalam melindungi hak anak anak korban perceraian di Kota Bengkulu baik dari perspektif penegak hukum maupun perspektif masyarakat dalam hal ini korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat, sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu berdasarkan pada fenomena atau kejadian yang secara fisik terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan sangat sedikit kasus penelantaran anak pasca perceraian yang dilaporkan kepenyidik, sementara ditingkat pengadilan dari tahun 2016 sampai 2018 tidak ada kasus penelantaran anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Hal ini disebabkan keengganan masyarakat korban penelantaran anak pasca perceraian melaporkan kasus penelantaran kepada penegak hukum dikarenakan beberapa faktor yaitu ; tidak yakin akan diproses, ketidak tahuan masyarakat kemana harus melapor, tidak mempunyai keberanian untuk melapor serta tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mantan suami. Hasil tersebut meunjukkan Hukum Perlindungan Anak tidak efektif melindungi anak anak korban perceraian di Kota Bengkulu

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Perlindungan Anak, Anak Korban Perceraian

ABSTRACT

The facts that occur in the midst of a community of many child victims of divorce are not supported by parents in this case father. The purpose of this study is to evaluate the law enforcement of child protection in protecting children of victims of divorce in the city of Bengkulu both from the perspective of law enforcement and community perspectives in this case neglected victims. This study uses an empirical legal research method that is to see the work of law in society, while the approach used is a sociological juridical approach that is based on phenomena or events that occur physically in society. The results showed that very few cases of neglect of children after divorce were reported to be investigated, while at the court level from 2016 to

2018 there were no cases of child neglect registered in the Bengkulu District Court. This is due to the reluctance of the victims of post-divorce child neglect to report cases of neglect to law enforcers due to several factors, namely; not sure if it will be processed, where people don't know where to report, don't have the courage to report and don't know where the ex-husband is. These results show that the Law on Child Protection does not effectively protect the children of children victims of divorce in the City of Bengkulu

Keywords: Law Enforcement, Child Protection Law, Child Divorce Victim

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya anak-anak korban perceraian tidak dinafkahi oleh orang tua dalam hal ini ayah pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari kasus anak korban perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus kasus perlindungan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan data yang dihimpun Republika dari KPAI (Republika, 5 April 2017), sepanjang 2011-2016 tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternative. Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus anak berhadapan dengan hukum

(ABH) yang mencapai 7.698 kasus. Sedangkan menurut Menteri Sosial jumlah anak yang ditelantarkan orang tuanya mencapai 5.900 kasus (Detik.com, 2015).

Berdasarkan persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orang tua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukkan fakta hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua secara penuh (Ardiana, 2015).

Meskipun banyak kasus penelantaran anak yang dilaporkan, akan tetapi sangat sedikit kasus ini

sampai keranah hukum. Berdasarkan Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung periode 2008-2010 yang didakwa Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya berjumlah dua kasus (M.Taufik,2013:168). Kasus ini paling sedikit dibandingkan kasus pidana anak lainnya. Fakta tersebut menunjukkan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua belum tersentuh hukum pidana meskipun ada sangsi pidananya.

Secara hukum, perceraian dan akibat hukumnya termasuk hak hak anak pasca perceraian merupakan ruang lingkup hukum perdata dalam hal ini Hukum Keluarga Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(Mardani, 2016:130). Akan tetapi meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan kewajiban seorang ayah membayar nafkah anak dengan jumlah tertentu, tetap saja banyak putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan jika tergugat (ayah) tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan. Oleh karena itu sering ditemukan putusan

putusan pengadilan agama yang memutuskan nafkah anak tidak dapat ditegakan (A.Choiri, 2015).

Dalam UndangUndang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak).

Hukum Perlindungan Anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan. Hakikatnya pelaksanaan pemenuhan hak anak adalah

untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(Abdusalam,2016:37)

Peraturan Perundang Undangan di Indonesia telah mengatur dengan tegas dan jelas sanksi pidana bagi setiap orang yang menelantarkan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya

secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Misalnya, anak dibiarkan kekuarangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain (Nurbaiti,2016). Pasal 77B berbunyi :” Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Nurbaiti,2016).

Penelantaran anak juga melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 49 yang berbunyi, : " Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) (Mohamad Taufik,2013:167).

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah Hukum Perlindungan Anak dapat ditegakkan untuk melindungi hak anak-anak korban perceraian di Kota Bengkulu ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini lebih memfokuskan kepada gejala masyarakat sebagai suatu institusi social (Anton F.Susanto,2015:17). Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Anton F.Susanto,2015:18).

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka pendekatan yang dipergunakan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum perlindungan anak di Kota Bengkulu adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mendasarkan pada fenomena atau kejadian yang secara fisik terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini

dipergunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penegakan Hukum Perlindungan Anak terhadap orang tua yang menelantarkan anak pasca perceraian, baik dari sisi masyarakat selaku pihak yang dirugikan maupun dari sisi penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menjerat pelaku penelantaran anak dengan pidana penelantaran.

Disamping pendekatan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghadirkan pendekatan yang lebih subjektif, interpretative, lekat budaya dan emansipatoris (Anton F.Susanto,2015:18) Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang (Ghoni MD *at all*, 2012:27) . Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah social(Cresswell *at all*,2010:4).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

1. **Data primer** merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun

hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan.

2. **Data sekunder** merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter Mahmud,2005:182).Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan peneggakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang

berkaitan dengan penegakkan hukum pidana.

b. Bahan hukum

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan (Peter Mahmud,2005:183).

Penelitian ini direncanakan dilakukan di Kota Bengkulu dengan populasi seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung baik lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maupun masyarakat dalam hal ini istri dan anak korban perceraian.

Untuk data primer, dikarenakan banyaknya populasi yang ada tersebut, maka dengan mempergunakan teknik random yang didasarkan atas purposive sampling, maka dari populasi tersebut dipilih beberapa pihak yang dijadikan sebagai sampel dan dianggap dapat mewakili secara keseluruhan korban penelantaran . Selain melakukan

wawancara dengan sampel-sampel yang telah ditentukan, data juga dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dalam hal ini beberapa orang yang dapat dianggap mewakili aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara penelantaran anak. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Setelah data primer maupun sekunder didapatkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa kata kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data Kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu pertama; hasil pengamatan, kedua hasil pembicaraan; ketiga hasil tertulis (Ivanovich Agusta,2003).

PEMBAHASAN**Penegakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Anak Korban Perceraian.**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly,2006).

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan

untuk menggunakan daya paksa (Jimly,2006).

Untuk menjawab permasalahan di atas ini peneliti akan meneliti penegakan hukum perlindungan anak dari sudut subjek yang luas artinya upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, baik lembaga penegak hukum dan masyarakat/korban.

1. Perspektif Lembaga Penegak Hukum

Untuk mengetahui penegakan hukum perlindungan anak dalam melindungi anak-anak korban perceraian oleh Penegak Hukum. Peneliti melakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bengkulu . Hasil penelitian menunjukkan sangat sedikit kasus penelantaran anak yang dilaporkan kepenyidik, bahkan di Polresta Bengkulu sejak tahun 2016-2018 hanya ada dua orang korban yang melapor dalam kasus penelantaran ekonomi dan status kedua korban pelapor masih berstatus sebagai istri yang sah karena belum bercerai, tapi semenjak menikahi korban dan anaknya tidak dinafkahi malah pelaku

meninggalkan korban dan anaknya begitu saja.

Unit PPA Polresta Bengkulu sampai saat ini tidak bisa menindaklanjuti kedua laporan tersebut dengan alasan; Untuk kasus pertama Terlapor tidak diketahui alamatnya, sedangkan pada kasus kedua Terlapor tidak mampu karena tidak punya pekerjaan tetap sehingga kasusnya tidak dilanjutkan.

Oleh karena tidak ada kasus penelantaran anak yang dilanjutkan oleh Polresta Bengkulu, sehingga di Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak ada kasus penelantaran anak yang sampai pada tahap penuntutan. Begitupun halnya di Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitra Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan semenjak tahun 2002 sampai tahun 2018 ini Pengadilan Negeri Bengkulu belum pernah menyidangkan perkara Penelantaran anak.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, menunjukkan pelaporan kasus penelantaran anak sangat sedikit (hanya dua kasus) dan tidak

ada satupun kasus yang sampai pada tahap persidangan. Hal tersebut menunjukkan Hukum Perlindungan Anak tidak dapat ditegakan, karena sangat sedikit kasus penelantaran anak pasca perceraian yang dilaporkan kepenyidik bahkan tidak ada satupun kasus yang sampai pada tahap persidangan

2. Perspektif Masyarakat/Korban

Untuk mengetahui apa yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus penelantaran anak pasca perceraian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dipilih secara acak. Dimana data responden itu kami peroleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat penggiat perlindungan perempuan dan anak di Kota Bengkulu seperti Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bengkulu. sebagai berikut :

a. Respoonden I (nama dan alamat disamarkan)

Seorang Ibu bernama Neneng telah bercerai dengan suaminya berinisial HR tahun 2016 di Pengadilan Agama Bengkulu, dimana dalam putusan Pengadilan

Agama Bengkulu telah menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar oleh HR, sedangkan HR bekerja sebagai ASN. Setelah bercerai ketiga Anak tinggal dengan Ibu Neneng, dimana ketiga anak tersebut adalah; Kembar A umur 16 tahun, Kembar B umur 16 tahun, dan Ganteng umur 7 tahun. Pasca perceraian, jalinan komunikasi antara anak dan ayah tidak terjalin dengan baik, selayaknya anak pada umumnya yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta kebutuhan atas tumbuh kembang anak, bahkan HR jarang sekali melihat anak-anaknya, begitu juga dengan hak anak dan isteri atas uang nafkah tidak maksimal diberikan untuk kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan sekolah dari tiga (3) orang anaknya. Maka untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehari-harinya Ibu Neneng bekerja serabutan. Cukup tidak cukup harus dicukupi apa lagi kedua orang anak kembarnya sudah SMA sehingga kebutuhan sekolah sudah semakin banyak

sedangkan HR tak mau tahu soal kebutuhan anak tersebut.

Atas perceraian orang tua berdampak kepada ketiga anak bu Neneng baik secara psikis maupun ekonomi. Secara psikis, anak-anak lebih banyak diam, sensitive dan jarang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Sedangkan secara ekonomi, kebutuhan anak-anak korban banyak tidak terpenuhi apa lagi kedua anak korban yang kembar sudah duduk di kelas 2 SMA sudah banyak sekali yang seharusnya mereka miliki atau kerjakan, seperti : les, kursus, praktek dll, karena kondisi keterbatasan ekonomi sang ibu, tak semua hal yang mereka dapatkan.

Ibu Neneng tidak mau melaporkan tindakan HR yang tidak menafkahi anak-anaknya pasca perceraian ke Polisi karena merasa sia-sia saja, sebab hasil keputusan hakim waktu perceraian atas hak anak saja tidak dipatuhi oleh HR, sehingga korban tidak ingin melaporkan lagi atas nafkah dan hak anak-anak korban ke penegak hukum.

b. Responden II (nama dan alamat disamarkan)

Ibu Puspa bercerai tahun 2016 dengan suaminya berinisial DM pekerjaan pemborong. Adapun alasan perceraian adalah suami berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya. Pasca perceraian di Pengadilan Agama, Ibu Puspa dan anaknya pulang kerumah orang tua korban, karena harus pemulihan sakit yang diderita korban yaitu terkena luka bakar akibat tersiram air panas. Setelah tidak serumah lagi DM tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah pada anak.

Dampak yang dialami Anak akibat perceraian secara psikis, anak korban lebih banyak diam, murung dan suka mengamuk jika ada sesuatu yang ia inginkan. Secara sosial, anak korban lebih minder dari teman-teman sepermainannya secara ekonomi, kebutuhan anak korban banyak tidak terpenuhi karena ibu korban yang sehari-harinya hanya sebagai pekerja buruh serabutan.

Adapun yang menjadi alasan Ibu Puspa tidak melaporkan DM

kepolisi karena tidak paham dan merasa percuma saja, ayah dari anaknya tidak bertanggung jawab sepenuhnya hingga memilih diam dan membiarkan saja.

c. Responden III (nama dan alamat disamakan)

Ibu Jurai umur 40 tahun pekerjaan serabutan telah bercerai dari suaminya UJ umur 45 tahun pekerjaan Swasta pada tahun 2015. Alasan perceraian adalah suami berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya,. Anak Anak korban berjumlah lima orang yang terdiri dari : M y(16 tahun), Aby (14 tahun), Mr (12 tahun),Nr (11 tahun) Hd (7 tahun).

Semenjak bercerai UJ tidak pernah lagi berkomunikasi dengan anak anaknya, tidak pernah mau tau keadaan anak anaknya dan tidak pernah memberi nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, Ibu Jurai bekerja apa saja dengan gaji 25 ribu sehari, sehingga anak laki lakinya yang lulus SD tidak sekolah lagi karena harus membantu ibunya bekerja.

Dampak yang dialami anak anak akibat perceraian orang tuanya adalah; Anak sulung korban

(My) pasca lulus SD tidak sekolah lagi dan menikah di usia dini, Anak no 2 (Aby) lulus SD tidak sekolah lagi karena harus bekerja serabutan untuk membantu ibunya menafkahi adik-adiknya, sedangkan Anak no 3 (Rn) putus sekolah pada saat kelas 4 SD karena tidak ada uang untuk membeli kebutuhan yang tak terduga baik di sekolah juga diluar sekolah, Anak no 4 (Nr) sekarang duduk di kelas 6 SD Anak no 5 (Hd) belum sekolah.

Secara Psikis, anak korban lebih banyak diam, murung dan suka ngamuk-ngamuk jika ada sesuatu yang ia inginkan. Secara Sosial, anak korban lebih minder dari teman-teman sepermainannya. Secara Ekonomi, anak korban kebutuhan anak korban banyak tidak terpenuhi Secara Pendidikan, anak-anak korban kehilangan hak pendidikannya

Ibu Jurai tidak melaporkan UJ ke Polisi dengan alasan tidak paham kemana harus melapor dan tidak ada keberanian untuk melapor.

d. Responden IV (nama dan alamat disamarkan)

Ibu Marni telah bercerai dengan suaminya yang bernama BS pekerjaan swasta pada tahun 2016. Setelah bercerai BS pulang ke Lampung dan meninggalkan 2 orang anak masig masing YI (15 tahun) dan Fb (13 tahun) dengan ibu Marni. Sampai saat ini BS tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan anaknya bu Marni bekerja serabutan.

Perceraian bu Marni berdampak terhadap anak anaknya yaitu secara psikis, anak korban lebih banyak diam, sensitive dan minder dari teman-teman sebayanya, secara ekonomi, anak korban yang sulung putus sekolah karena keterbatasan biaya, anak anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena masalah ekonomi anak bungsu bu Marni berurusan dengan aparat hukum karena mencuri disalah satu warung manisan milik warga karena pergaulan yang salah. Bu Marni

tidak melaporkan BS ke penegak hukum disebabkan karena tidak paham kemana melapor dan tidak tahu dimana posisi mantan suaminya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Dari keempat kasus di atas dapat dilihat Anak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya dimana akibat perceraian berdampak baik secara ekonomi, sosial dan mental bagi si anak. Walaupun ada undang undang perlindungan anak yang bertujuan melindungi hak hak anak, akan tetapi orang tua dalam hal ini ibu enggan melaporkan kasus ini ke pihak penegak hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan korban tidak mau melapor; pertama korban tidak percaya dengan penegak hukum karena putusan pengadilan agama yang memutus nafkah anak yang harus dibayar ayah tidak dipatuhi, kedua ketidaktahuan kemana harus melapor dan tidak mengetahui tata caranya, alasan ketiga korban tidak mempunyai keberanian untuk melapor karena tidak yakin akan

diproses, sedangkan alasan keempat adalah korban tidak mengetahui keberadaan suaminya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan hukum perlindungan anak tidak efektif melindungi hak anak anak korban perceraian di Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat baik ditingkat penegak hukum maupun dimasyarakat, hukum perlindungan anak tidak dapat ditegakan untuk melindungi hak anak anak korban perceraian, karena adanya sikap diam dan cenderung membiarkan dari masyarakat terhadap tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh ayah pasca perceraian. Sangat sedikit kasus penelantaran anak pasca perceraian yang dilaporkan ke penyidik, walaupun ada laporan tidak dapat dilanjutkan sampai ketingkat penuntutan karena tidak ada kesungguhan dari kedua belah pihak untuk menindaklanjuti kasus ini, sementara ditingkat pengadilan dari tahun 2016 sampai 2018 tidak ada kasus penelantaran anak yang

terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kasus penelantaran anak yaitu ; berbelit belitnya proses pemeriksaan dan tidak yakin akan diproses, ketidaktahuan masyarakat kemana harus melapor, tidak mempunyai keberanian untuk melapor serta tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mantan suami.

B. Saran

Untuk menegakan hukum perlindungan anak dalam melindungi anak anak korban perceraian maka bagi penegak hukum perlu ada regulasi untuk mempermudah proses penyidikan terhadap kasus penelantaran anak yang berbeda dari penanganan kasus pidana lainnya terutama dalam pembuktian. Salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk melapor disebabkan rumitnya proses pemeriksaan dan banyaknya alat bukti yang harus disiapkan.

Sedangkan untuk masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hak hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian serta

sanksi hukum bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian yang berjudul "Evaluasi Penegakan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Anak Anak Korban Perceraian di Kota Bengkulu". Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 3. Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bengkulu, Yayasan PUPA, KPI, Pengadilan Negeri Bengkulu serta Pihak-pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat bermanfaat untuk

pengembangan Program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, 2016 *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta

Alfian Qodri Azizi, 2016 *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di*

Indonesia, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Anton F.Susanto, 2015 *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Setara Press Malang

Anisa Indrayani, 2011 Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan

Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Jurnal Musawa ISSN: 1412-3460 E-ISSN: 2503-4596 ,Vol.10, No.2, Juli 2011 hal 184 (Terakreditasi Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2015

Ardiana Mali Anglisticum, 2015 *Parents Communication after Divorce and Its Impact on their*

Children Behavior Journal (IJLLIS) p-ISSN: 1857-8179• e-ISSN: 1857-8187

Volume 4, issue 11

Betra Sarianti, 2015 Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Diantara Harapan dan

Hambatan Jurnal Ilmiah Kutei ISSN 1412-9639 edisi 28 April 2015 hal 44

Cresswell, John. W, 2010, *Research Design* : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan

Mixed, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Didmus Dewa, 2016 *The Plight of Children as Secondary Victims of Divorce in Gweru Zimbabwe: 2013 – 2016* International Journal of Advanced Science and Technology Vol.91 hal.12 ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright © 2016 SERSC

Ghony, M.D, dan Almanshur, F, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :

Ar- Ruzz Media.

Ivanovich Agusta 2003, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor 27 Februari 2003

Jimly Ashidique, 2006, *Penegakan Hukum*

Mardani 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Prenamedia Group Jakarta

Mohammad Taufik Makaro, 2013 Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Rineka
Cipta Jakarta

Maidin Gultom 2012, Perlindungan
Hukum terhadap Anak dan
Perempuan, Refika Aditama
Bandung

Nurbaity Prastyananda, 2016
Penelantaran Rumah Tangga (
Kajian Hukum Dan Gender)
Muwazah ISSN 2502-5368
(Paper) ISSN 2085-8353 Vol. 8,
No.1, hal 80

Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian*
Hukum, Jakarta
Kencana, Jakarta

Pustaka Yustisia 2010, Perundangan
tentang Anak, Yokyakarta

Rahmadi Indra Tektona 2012,
Kepastian Hukum Terhadap
Perlindungan Hak Anak

Korban Perceraian Jurnal
Muwazah, 2502-5368 (Paper)
ISSN 2085-8353 Volume. 4,
Nomor. 1, hal 44

Satria Efendi 2004, *Problematika*
Hukum Keluarga Kontenporer
Jakarta Kencana

Suteki, 2015, Masa Depan Hukum
Progresif, Yogyakarta: Thafa
Media.

Undang Undang Perkawinan di
Indonesia 2007 Surabaya
Arkola.